

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah dengan membagi wilayahnya menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, mencakup proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta cara untuk mempertanggungjawabkannya. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam hal keuangan, disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk mengelola dana secara efektif guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan (Rosidin, 2010).

Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah menjadi lebih fleksibel dalam menyusun dan mengelola anggaran guna memenuhi berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Trilaksono, 2020). Otonomi ini memungkinkan daerah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap alokasi anggaran, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Khusaini, 2018). Pemerintah daerah juga diberi keleluasaan dalam menetapkan kebijakan fiskal, mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah, dan menarik investasi. Hal ini memungkinkan daerah untuk menggali potensi ekonomi lokal secara maksimal, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memprioritaskan

program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Handayani, 2011).

Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan memuat estimasi pendapatan serta alokasi belanja daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Permendagri No. 15 Tahun 2024). APBD disusun bersama DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pelaksanaan keuangan daerah. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 4, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah dan menjadi dasar evaluasi dalam pengambilan kebijakan (Yohanes, 2023). Menurut Hutabarat (2021), menilai kesehatan keuangan melalui laporan keuangan memungkinkan pemerintah daerah memahami kekuatan dan kelemahan keuangannya serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Kinerja keuangan daerah mencerminkan hasil evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Ramadana et al., 2023; Kusuma et al., 2018). Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis rasio keuangan terhadap pelaksanaan APBD, yang

dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara optimal (Morasa, 2017).

Rasio keuangan merupakan alat analisis penting dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Melalui pendekatan rasio, pemerintah daerah dapat menilai seberapa efektif dan efisien sumber daya keuangan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rasio-rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mengelola pendapatan dan belanja, serta mendanai pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak luar (Mahmudi 2016).

Penggunaan rasio keuangan juga membantu dalam mengukur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Beberapa rasio utama yang sering digunakan antara lain rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi, rasio efektivitas, serta rasio pertumbuhan dan keserasian. Dengan menganalisis rasio-rasio tersebut, pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, legislatif daerah, dan masyarakat dapat menilai apakah keuangan daerah dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Mahmudi 2016).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Kabupaten Nagekeo sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menghadapi tantangan yang sama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Salah satu

permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi indikator awal bahwa kemandirian fiskal daerah masih lemah dan perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo selama 3 tahun terakhir (2021-2023), pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (APBD)
Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2021-2023 (Dalam Jutaan)

No	Akun	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
A	PENDAPATAN DAERAH	2021	723.436.149	584,172,780	80.75
		2022	737,915,867	687,072,054	93.11
		2023	735,649,759	704,839,860	95.81
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2021	39,860,944	25,914,676	65.01
		2022	52,210,826	26,530,476	50.81
		2023	48,349,982	28,352,357	58.64
2	PENDAPATAN TRANSFER	2021	668,060,524	542,457,109	81.20
		2022	679,146,119	654,979,489	96.44
		2023	679,861,622	668,933,782	98.39
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2021	15,514,680	15,800,994	101.85
		2022	6,558,922	5,562,088	84.80
		2023	7,438,153	7,553,720	101.55
B	BELANJA	2021	860,147,773	723,058,315	84.06
		2022	771,727,562	690,503,713	89.48

		2023	745,994,107	648,870,457	86.98
1	Belanja Operasi	2021	519,447,244	449,916,503	86.61
		2022	511,025,944	456,503,145	89.33
		2023	525,985,675	442,247,578	84.08
2	Belanja Modal	2021	195,016,705	160,764,895	82.44
		2022	125,972,561	102,688,532	81.52
		2023	86,741,952	74,169,770	85.51
3	Belanja Tidak Terduga	2021	5,951,456	3,628,745	60.97
		2022	8,054,124	4,637,104	57.57
		2023	6,899,407	6,086,036	88.21
4	Belanja Transfer	2021	139,732,366	108,748,171	77.83
		2022	126,674,931	126,674,931	100.00
		2023	126,367,072	126,367,072	100.00
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2021	141,711,624	140,796,294	99.35
		2022	38,811,694	37,863,214	97.56
		2023	15,344,348	14,374,996	93.68
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2021	5,000,000	5,000,000	100.00
		2022	5,000,000	5,000,000	100.00
		2023	5,000,000	5,000,000	100.00

Berdasarkan tabel 1.1. di atas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun mengalami fluktuasi. Dari data diatas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran masih digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah sehingga masyarakat di daerah kurang optimal menerima manfaat anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Nagekeo masih tergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Data-data tersebut menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap total

Pendapatan Daerah masih sangat kecil yang dimana kemampuan keuangan daerah dikaji lebih lanjut terkait tingkat ketergantungan, efektivitas dan indikator kinerja.

Sebagai dasar untuk menganalisis kinerja keuangan daerah, khususnya dalam hal kemandirian, efektivitas, dan efisiensi, maka dilakukan telaah terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagekeo selama periode 2021 hingga 2023. Data ini memberikan gambaran sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi keuangan lokal dan mengelola anggaran secara optimal guna menunjang pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Marliani (2022) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 dengan hasil Kinerja keuangan Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rasio derajat desentralisasi termasuk kategori kurang sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kurang. Rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi belanja tergolong sudah efisien. Penelitian terdahulu kedua oleh Harahap (2020) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan hasil menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung keuangan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi dan pelayanan umum lebih baik meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan terus mengalami

peningkatan. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Penelitian terdahulu ketiga oleh Fasha (2023) menunjukkan bahwa kinerja pendapatan sudah mencapai target, termasuk dalam kategori sangat efektif hal ini terlihat dari lebih besarnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kota Samarinda dinilai sangat efisien karena dinilai mampu menghemat anggaran. Hal ini terjadi dari adanya tingkat dan kriteria yang ditentukan serta sesuai target yang dicapai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Periode 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021-2023 dengan Analisis Pendapatan, Analisis Belanja dan Analisis Pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengawasi penggunaan dana publik.

2. Bagi Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan Daerah sebagai referensi penting bagi peneliti dan akademisi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam mengembangkan kemampuan analisis terhadap laporan keuangan daerah, khususnya dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan melalui pendekatan rasio-rasio keuangan. Penelitian ini juga memperluas wawasan peneliti dalam memahami konsep desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, proses penelitian ini membantu peneliti dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, interpretasi data, serta penyusunan laporan ilmiah secara sistematis dan bertanggung jawab. Pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan karier akademik maupun profesional di bidang akuntansi dan keuangan sektor publik.